

Hattrick WTP, SDK Sebut Kuncinya Integritas

Sumber : <http://radarsulbar.co.id/read/6/7/1037/Hattrick.WTP.SDK.Sebut.Kuncinya.Integritas.html>



Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Sumedi, S.H.,C.N menyerahkan dokumen Laporan hasil pemeriksaan (LHP) 2014, kepada Bupati Mamuju, Dr. H. Suhardi Duka di Auditorium BPK RI, Perwakilan Sulbar, Selasa 30 Juni. (foto:FirdausPaturusi/RadarSulbar)

MAMUJU -- Sepuluh tahun memimpin Kabupaten Mamuju, Suhardi Duka (SDK) kini mencatatkan namanya sebagai kepala daerah pertama di Sulbar yang sukses mengelola keuangan daerah.

Mulai 2012, 2013, hingga yang teranyar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar terhadap pertanggungjawaban keuangan Pemkab Mamuju 2014, semuanya dihadiahi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ¹.

Opini yang ketiga kalinya itu diberikan di Auditorium BPK Perwakilan Sulbar, Selasa 30 Juni.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar Sumedi menjelaskan, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern², dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2014, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Mamuju, BPK RI menemukan beberapa permasalahan, diantaranya Neraca Pemkab Mamuju per 31 Desember 2014 menyajikan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 8.347.488.959. Kemudian, Kadispenda Mamuju belum melakukan rekonsiliasi atas piutang PBB-P2

¹ Menurut Standar Profesional Akuntan (PSA 29), pendapat Wajar Tanpa Pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

² Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

dengan KPP Pratama.

Laporan keuangan Pemkab Mamuju 2014 (unaudited) menyajikan saldo pada akun kas di bendahara pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp 1.947.677.063 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 9.066.558.040.

"Pemeriksaan atas laporan realisasi penerimaan pembiayaan diketahui bahwa atas saldo kas bendahara pengeluaran tahun pada dinas pekerjaan umum belum diiseter ke kas daerah dan negara sebesar Rp 1.533.652.754 dan sebesar Rp 57.464.179," sebut Sumedi.

Ia melanjutkan, pemeriksaan atas saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2014 diketahui bahwa kas di Dinas PU sebesar Rp 559.816.035. Seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke kas daerah dan kas negara.

"Mempertimbangkan permasalahan tersebut, BPK RI memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP)," jelas Sumedi.

Usai penyerahan LHP tersebut, Bupati Mamuju Suhardi Duka (SDK) tampak begitu senang. Betapa tidak, dengan tiga kali mendapatkan WTP, ia menjadi bupati pertama di Sulbar yang menapaki pencapaian tersebut.

Sebelumnya, belum pernah ada yang melakukannya. Ini seperti kado manis bagi bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 8 Oktober 2015 nanti.

Kepada sejumlah wartawan, SDK menyampaikan, kesuksesan Mamuju meraih hatrnick WTP berkat kerja keras seluruh staf dan integritas pejabat di kabupaten yang ia pimpin.

Meski demikian, SDK juga membeberkan bahwa masih ada SKPD yang masih memiliki piutang, utamanya pada PBB-P2. Tetapi ia segera melakukan rekonsiliasi dengan yang bersangkutan sehingga bisa diitndaklanjuti.

Ketua DPRD Kabupaten Mamuju St Suraidah Suhardi yang juga hadir dalam penyerahan LHP dari BPK tersebut, menyampaikan bahwa DPRD akan segera melakukan koordinasi dengan jajarannya, sehingga rekomendasi yang telah diterima dari pihak BPK bisa ditindaklanjuti di lembaga yang ia pimpin tersebut.

Reward Menanti

Suhardi Duka memastikan Pemkab Mamuju akan mendapatkan reward atau insentif dari APBN sebesar Rp 25 miliar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.

"Dua tahun berturut-turut kita telah nikmati reward Rp 4 miliar atas penghargaan WTP ini, dan dengan mampunya kita meraih WTP sebanyak tiga kali berturut-turu maka rewardnya kembali ditambah dengan jumlah Rp 25 miliar dari Kementerian Keuangan," jelas bupati dua periode itu.

Dana sebesar Rp 25 miliar itu akan dipakai membangun gedung DPRD Mamuju tahun depan serta membenahi infrastruktur dalam Kota Mamuju.

"Karena lokasi gedung DPRD Mamuju yang masih difungsikan saat ini akan dilalui pembangunan jalur arteri, maka rencana kita akan pindahkan ke eks kantor gabungan dinas-dinas yang telah terbakar. Mungkin sekira Rp 15 miliar kita akan alokasikan kasana, selebihnya untuk membenahi infrastruktur jalan serta drainase dalam kota," urainya. (fir/ham)

Raih WTP Ketiga, Ada Temuan Rp.8 M

Mamuju, Fajar – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemkab Mamuju, bukan berarti bebas temuan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pada piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp8 miliar.

Kepala BPK Sulbar, Sumedi mengatakan, Dinas Pendapatan Daerah Mamuju belum melakukan rekonsiliasi atas piutang PBB-P2 dan KKP (Kantor Pelayanan Pajak, red) Pratama.

Sumedi mengungkapkan temuan itu pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Mamuju Tahun Anggaran 2014, Selasa, 30 Juni, di Auditorium BPK Sulbar.

Bupati Mamuju, Suhardi Duka membenarkan adanya beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih memiliki piutang. Suhardi berjanji segera melakukan rekonsiliasi bersama pihak terkait, yakni Dispenda Mamuju sehingga rekomendasi dari BPK dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari.

Opini WTP dari BPK kali ini merupakan kali ketiga yang diperoleh Pemkab Mamuju selama tiga tahun berturut-turut. Suhardi mengatakan, keberhasilan itu tak lepas dari kerja keras seluruh pegawai dan integritas pejabat.

Kementerian Keuangan, kata Suhardi, menjanjikan hadiah sebesar Rp25 miliar atas keberhasilan Pemkab Mamuju meraih opini WTP untuk ketiga kalinya.

Sumber : Fajar edisi Rabu, 1 Juli 2015